Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 32605-32613

KOLABORASI MULTI-STAKEHOLDER PARTNERSHIP DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN LAHAT, KABUPATEN LAHAT

Elsi Eltalia[1], Ainur Ropik[2], Erik Darmawan[3]

[1,2,3]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding Author: Elsi Eltalia, e-mail: elsieltalia670@gmail.com

Published: Juni , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi multi-stakeholder partnership (MSP) dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Lahat merupakan wilayah yang secara konsisten mengalami banjir hampir setiap tahun akibat faktor geografis berupa kedekatan dengan aliran Sungai Lematang, sistem drainase yang tidak memadai, alih fungsi lahan, serta perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya mitigasi bencana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tujuh informan dari unsur pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat, serta dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) yang mencakup empat indikator utama, yaitu kondisi awal (starting condition), desain institusional (institutional design), kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership), dan proses kolaborasi (collaborative process). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi penanggulangan banjir di Kecamatan Lahat telah memenuhi sebagian besar unsur collaborative governance, ditandai oleh kondisi awal yang kondusif, kepercayaan antar pihak yang telah lama terjalin, serta capaian konkret berupa pembangunan dinding penahan banjir, terbentuknya kelompok Desa Tangguh Bencana, dan beroperasinya sistem peringatan dini berbasis BMKG. Namun, kolaborasi ini masih terbatas pada koordinasi teknis operasional, bersifat hierarkis dan top-down, serta belum menyentuh akar masalah struktural banjir.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Kolaborasi Multi-Stakeholder, Penanggulangan Banjir, Ansell dan Gash, Kabupaten Lahat.

ABSTRACT

This study aims to analyze multi-stakeholder partnership (MSP) collaboration in flood disaster management in Lahat District, Lahat Regency, South Sumatra Province. Lahat District consistently experiences flooding almost every year due to its geographic proximity to the Lematang River, inadequate drainage systems, land-use conversion, and community behavior that does not fully support disaster mitigation efforts. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through field observation, in-depth interviews with seven informants from government agencies, TNI-Polri, and community representatives, as well as documentation. Data analysis used the collaborative governance theory of Ansell and Gash (2008), encompassing four main indicators: starting condition, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. The results indicate that flood management collaboration in Lahat District has fulfilled most collaborative governance elements, marked by conducive starting conditions, well-established inter-stakeholder trust, and concrete achievements including the construction of flood retaining walls, formation of Disaster-Resilient Village groups, and the operation of a BMKG-based early warning system. However, this collaboration remains limited to technical operational coordination, is hierarchical and top-down in nature, and has not yet addressed the structural root causes of flooding.

Keywords: Collaborative Governance, Multi-Stakeholder Collaboration, Flood Management, Ansell and Gash, Lahat Regency.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Bencana banjir merupakan salah satu ancaman hidrometeorologi yang paling sering melanda wilayah Indonesia, khususnya pada musim penghujan. Indonesia menempati posisi sebagai salah satu negara dengan frekuensi bencana hidrometeorologi tertinggi di dunia, dan banjir menjadi jenis bencana yang paling berulang dengan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat terdampak. Dalam konteks ini, respons terhadap banjir tidak lagi dapat diserahkan sepenuhnya kepada satu institusi tunggal, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif.

Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kerentanan banjir secara berulang setiap tahunnya. Sebagai pusat Kabupaten Lahat yang memiliki 17 Kelurahan dan 13 Desa, Kecamatan Lahat mengalami dampak banjir yang sangat signifikan. Data menunjukkan bahwa lebih dari setengah wilayah kecamatan ini mengalami banjir dengan ketinggian berkisar antara 30 hingga 80 cm. Kelurahan yang paling sering terdampak meliputi Pasar Bawah, Pasar Lama, Talang Jawa, Banjar Jaya, Kota Jaya, dan Bandar Agung (Rohmawati, 2025).

Kondisi geografis Kecamatan Lahat yang terletak di kawasan pegunungan Bukit Barisan dengan topografi berbukit dan lereng curam, serta kedekatan dengan aliran Sungai Lematang sebagai salah satu anak terbesar Sungai Musi, menjadikannya sangat rentan terhadap banjir bandang. Persoalan ini diperparah oleh pendangkalan Sungai Lematang, sistem drainase yang tidak memadai, perubahan tata guna lahan akibat pembangunan yang kurang terencana, serta perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya mitigasi bencana.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mencakup kerugian material dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga gangguan terhadap aktivitas sosial-ekonomi masyarakat sehari-hari. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lahat telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kontinjensi Banjir sebagai landasan hukum dan pedoman strategis. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 17 Tahun 2022 yang secara eksplisit menetapkan BPBD sebagai koordinator utama kolaborasi lintas sektor. Regulasi-regulasi tersebut sekaligus membuka ruang partisipasi lintas sektor dalam sistem penanggulangan bencana dan mencerminkan komitmen politik pemerintah daerah. Namun, keberadaan regulasi semata tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas permasalahan banjir yang bersifat multidimensi, mencakup aspek teknis infrastruktur, sosial, ekonomi, dan politik.

Penanganan banjir yang efektif mensyaratkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan yang saling melengkapi. Tidak ada satu aktor pun yang memiliki kapasitas, sumber daya, dan legitimasi yang memadai untuk menangani permasalahan ini secara mandiri. Oleh karena itu, kolaborasi multi-stakeholder partnership (MSP) antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai instansi terkait menjadi pendekatan yang strategis dan mendesak untuk diwujudkan. Menurut Hemmati et al. (2002), proses multi-stakeholder bertujuan untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan utama dalam bentuk komunikasi dan pengambilan keputusan baru atas suatu isu tertentu, didasarkan pada prinsip kesetaraan dan akuntabilitas.

Penelitian tentang kolaborasi dalam penanggulangan banjir telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Putri Agusna (2023) meneliti kolaborasi BPBD dengan masyarakat di Kabupaten Lahat dan menemukan bahwa pola simbiotik antara pemerintah dan komunitas lokal mampu meningkatkan efektivitas penanganan. Tanzil (2024) menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis komunitas di Kota Kendari menghasilkan kolaborasi yang baik, meski partisipasi masyarakat belum merata. Umabaihi (2022) menemukan bahwa di Kabupaten Kepulauan Sula, kolaborasi belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan belum dilibatkannya akademisi. Adapun Riska et al. (2023) di Banda Aceh menegaskan bahwa tanpa kepercayaan yang kuat, kolaborasi akan terhambat.

Meski demikian, kajian yang secara komprehensif menganalisis kolaborasi multi-stakeholder partnership antara pemerintah, masyarakat, TNI-Polri, dan media dalam konteks penanggulangan banjir di Kecamatan Lahat sebagai pusat kabupaten dengan karakteristik urbanisasi tinggi dan kompleksitas politik lokal yang khas masih belum ada. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut, sekaligus mengkaji dimensi negosiasi kekuasaan, distribusi sumber daya, dan proses pembentukan kepercayaan dalam kolaborasi multi-aktor di tingkat kecamatan.

Rumusan masalah yang dikaji adalah: (1) Bagaimana kebijakan penanggulangan banjir yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lahat? (2) Bagaimana kolaborasi multi-stakeholder partnership memengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kecamatan Lahat?

KERANGKA TEORI

Teori Collaborative Governance Ansell dan Gash

Teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) merupakan salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam kajian kebijakan publik kontemporer. Konsep ini menekankan bahwa proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan tidak lagi dapat ditangani secara unilateral oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari para aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ansell dan Gash mendefinisikan collaborative governance sebagai suatu mekanisme tata kelola di mana satu atau lebih lembaga pemerintah melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, dan bersifat deliberatif, yang bertujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik, mengelola program publik, atau mengelola aset publik (Ansell & Gash, 2008, p. 544). Definisi ini menegaskan bahwa collaborative governance bukan sekadar konsultasi atau koordinasi biasa, melainkan sebuah proses di mana semua pihak benar-benar terlibat dalam pengambilan keputusan.

Terdapat enam kriteria utama yang harus dipenuhi agar sebuah proses dapat disebut collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2008, pp. 544-545): pertama, diinisiasi oleh pemerintah, artinya pemerintah membuka forum resmi untuk mengajak pihak lain berkolaborasi; kedua, melibatkan aktor non-negara seperti LSM, komunitas masyarakat, dan media; ketiga, semua pihak ikut memutuskan sehingga setiap pendapat dihargai; keempat, forum bersifat formal dan terstruktur dengan jadwal, aturan, dan mekanisme yang jelas; kelima, keputusan diupayakan melalui musyawarah; dan keenam, fokus pada masalah publik seperti isu lingkungan, tata ruang, dan pemerintahan.

Ansell dan Gash (2008, pp. 550-557) kemudian mengidentifikasi empat variabel kunci yang menentukan efektivitas kolaborasi dalam model yang mereka kembangkan. Pertama adalah kondisi awal (starting condition) yang mencakup perbedaan sumber daya antar aktor, faktor pendorong keterlibatan, dan riwayat hubungan antar pihak sebelumnya. Kedua adalah desain institusional (institutional design) yang meliputi kejelasan aturan, keterbukaan proses, dan inklusivitas forum. Ketiga adalah kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership) yang menekankan peran pemimpin bukan sebagai pengendali, melainkan

sebagai fasilitator dialog yang menjembatani perbedaan kepentingan. Keempat adalah proses kolaborasi (collaborative process) yang mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil antara.

Konsep Multi-Stakeholder Partnership (MSP)

Konsep Multi-Stakeholder Partnership (MSP) pertama kali dipopulerkan oleh Hemmati et al. (2002) dalam konteks tata kelola global. Hemmati mendefinisikan MSP sebagai proses yang bertujuan untuk menyatukan semua pemangku kepentingan utama dalam bentuk komunikasi dan pengambilan keputusan baru mengenai suatu isu tertentu, yang didasarkan pada pengakuan pentingnya mencapai kesetaraan dan akuntabilitas dalam komunikasi antar pemangku kepentingan, melibatkan representasi yang adil dari tiga atau lebih kelompok pemangku kepentingan (Hemmati et al., 2002, p. 2).

MSP memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk kolaborasi lain melibatkan tiga atau lebih aktor dengan latar kepentingan dan kekuasaan berbeda, representasi yang adil dan setara, merupakan proses yang berkelanjutan, bukan sekadar forum satu kali, menempatkan komunikasi dan dialog sebagai inti proses, fleksibel dalam bentuk dan tingkat keterlibatan serta berorientasi pada pemecahan masalah bersama. Kemunculan MSP dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan metode yang lebih inklusif dan efektif dalam menghadapi isu-isu kompleks yang tidak dapat ditangani secara sepihak (Hemmati et al., 2002, pp. 2-4).

Dalam konteks penelitian ini, MSP melibatkan tiga elemen utama: pemerintah (diwakili oleh BPBD, kecamatan, kelurahan, dan dinas-dinas terkait) sebagai penyusun regulasi dan penyedia infrastruktur; TNI-Polri sebagai komponen keamanan dan penguatan kapasitas lapangan; serta masyarakat yang terlibat melalui kelompok Desa Tangguh Bencana sebagai subjek terdampak sekaligus pelaksana program berbasis komunitas. Interaksi ketiga elemen ini dalam kerangka penanggulangan banjir di Kecamatan Lahat menjadi fokus utama analisis dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses kolaborasi yang terjadi antar pemangku kepentingan dalam konteks penanggulangan banjir di Kecamatan Lahat. Pendekatan ini dipilih karena sangat relevan dengan teori kolaborasi multi-stakeholder yang menekankan pentingnya interaksi dan komunikasi di antara aktor publik dan non-publik dalam penyusunan serta pengimplementasian kebijakan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyajikan pemahaman yang sistematis, menyeluruh, rinci, dan mendalam terkait isu kolaborasi tersebut, sehingga dapat menghasilkan gambaran konkret mengenai kondisi nyata di lapangan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui tiga teknik. Pertama, observasi lapangan untuk mengamati secara langsung perilaku dan aktivitas para pemangku kepentingan dalam merespons banjir di Kecamatan Lahat. Kedua, wawancara mendalam dengan tujuh informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri dari tiga orang perwakilan pemerintah (BPBD Kabupaten Lahat, Kasi Kesos Kecamatan

Lahat , dan Ketua Tim Pelaksanaan BPBD , dua orang perwakilan TNI-Polri, serta dua orang perwakilan masyarakat. Ketiga, dokumentasi berupa pengumpulan data dari dokumen resmi, foto kegiatan, dan arsip kebijakan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan instansi terkait.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (2019) yang terdiri dari tiga tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal hal pokok, dan memfokuskan pada informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu menginterpretasikan data secara mendalam untuk menemukan makna yang berkaitan dengan penelitian. Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan Kecamatan Lahat merupakan pusat Kabupaten dengan karakteristik urbanisasi yang tinggi dan kompleksitas politik lokal yang khas, wilayah ini mengalami banjir berulang hampir setiap tahun sehingga kolaborasi lintas sektor telah berjalan secara nyata dan adanya regulasi kebijakan yang menetapkan kerangka kolaborasi multi-stakeholder secara formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah Kabupaten Lahat

Kebijakan penanggulangan banjir di Kecamatan Lahat telah tersusun secara sistematis dalam tiga tahap sesuai dengan siklus manajemen bencana, yaitu tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2026.

Pada tahap prabencana, pemerintah melaksanakan berbagai program pencegahan dan mitigasi, antara lain pemetaan zona rawan banjir, sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan satgas banjir, pemeliharaan sistem peringatan dini, serta pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan saluran drainase secara berkala. Program Desa Tangguh Bencana yang dilaksanakan BPBD bersama BNPB menjadi salah satu program unggulan di tahap ini, di mana masyarakat dilatih bagaimana bertindak saat bencana terjadi, termasuk cara melakukan evakuasi mandiri.

Pada tahap tanggap darurat, BPBD bertindak sebagai koordinator utama dengan mengintegrasikan seluruh kapasitas dari berbagai instansi. Dana siap pakai yang dapat dicairkan segera ketika status darurat banjir ditetapkan menjadi instrumen penting untuk merespons situasi darurat secara cepat. Pada tahap pascabencana, kebijakan mencakup rehabilitasi yang dimulai dari pengkajian kerusakan paling lambat 5 hari setelah status darurat dicabut, serta rekonstruksi wilayah yang bertujuan membangun kembali wilayah terdampak dengan mempertimbangkan aspek pengurangan risiko banjir ke depan.

Kebijakan pendanaan penanggulangan banjir bersumber dari tiga jalur utama: alokasi anggaran reguler melalui APBD Kabupaten Lahat,dana siap pakai melalui BPBD dan BNPB, serta belanja bantuan sosial bagi korban banjir yang mekanisme penyalurannya diatur dalam Peraturan Bupati Lahat Nomor 1 Tahun 2023. Peraturan Bupati Lahat Nomor 17 Tahun 2022 menjadi landasan utama yang menetapkan BPBD sebagai lembaga pelaksana kolaborasi, dibantu oleh berbagai pihak seperti TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

Kolaborasi Multi-Stakeholder Partnership Berdasarkan Teori Ansell dan Gash

Kondisi Awal (Starting Condition)

Sebelum menilai bagaimana kolaborasi dapat berjalan dengan baik, Ansell dan Gash (2008, pp. 550-551) menekankan pentingnya memahami kondisi yang telah ada sebelumnya. Kondisi awal mencakup tiga aspek perbedaan sumber daya

antar aktor, faktor pendorong keterlibatan, dan riwayat hubungan antar pihak. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat jelas bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki sumber daya dan keunggulan komparatif yang berbeda. BPBD memiliki keunggulan dari sisi peralatan seperti perahu karet, tenda, dan perlengkapan evakuasi. Hal ini diakui langsung oleh pihak TNI Sementara itu, TNI dan Polri memiliki keunggulan dari sisi tenaga terlatih yang berguna saat evakuasi dan menjaga keamanan. Kecamatan dan kelurahan unggul karena memiliki pengetahuan mendalam tentang wilayahnya dan akses langsung ke warga.

Adapun masyarakat, terutama yang tergabung dalam kelompok Desa Tangguh Bencana, memiliki pemahaman paling mendalam tentang kondisi lapangan dan karakteristik banjir di daerahnya. Menariknya, perbedaan sumber daya ini tidak menjadi hambatan, melainkan justru menjadi perekat kolaborasi. Semua pihak menyadari kekuatan masing-masing instansi sehingga menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Faktor pendorong keterlibatan pun beragam: setiap instansi memiliki tanggung jawab formal atas wilayah dan bidangnya

Temuan yang cukup menarik adalah fakta bahwa kolaborasi ini bukan sesuatu yang baru. Semua pihak sudah saling mengenal dan terbiasa bekerja sama sejak lama. Tidak adanya konflik serius yang pernah terjadi antar instansi membuat suasana awal kolaborasi ini dapat dikatakan sudah cukup sehat. Hal ini sejalan dengan argumen Ansell dan Gash (2008) bahwa riwayat kerjasama yang baik dapat menciptakan kepercayaan awal yang memudahkan proses kolaborasi ke depannya.

Desain Institusional (Institutional Design)

Ansell dan Gash menegaskan bahwa kolaborasi yang baik membutuhkan wadah atau forum yang jelas, aturan yang disepakati, dan inklusivitas dalam keterlibatan. Dari data yang dikumpulkan, keterlibatan berbagai pihak dalam kolaborasi di Kecamatan Lahat cukup luas. Dalam hal forum dan mekanisme komunikasi, terdapat dua forum utama yang digunakan. Pertama, grup WhatsApp lintas instansi yang difungsikan untuk berbagi informasi secara cepat. Kedua, koordinasi langsung di lapangan, terutama di posko bencana yang dibentuk saat kejadian berlangsung. Namun, peneliti menemukan catatan penting bahwa belum ada SOP atau aturan tertulis yang secara resmi mengatur bagaimana kolaborasi ini harus berjalan.

Ketiadaan MOU formal ini menjadi kelemahan struktural yang signifikan. Jika tidak ada landasan tertulis, kolaborasi yang telah berjalan baik ini rentan terganggu saat terjadi pergantian pejabat atau situasi di luar kebiasaan. Satu hal lain yang menarik perhatian adalah sentralnya posisi Bupati. Hampir semua keputusan dan program membutuhkan persetujuan atau arahan dari Bupati, termasuk dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana, di mana Bupati terlibat langsung dalam pembekalan Kondisi ini menciptakan dinamika yang ambivalen di satu sisi, dukungan dari pucuk pimpinan daerah memberi legitimasi kuat bagi kolaborasi di sisi lain.

Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative Leadership)

Ansell dan Gash (2008) menempatkan kepemimpinan fasilitatif sebagai salah satu variabel paling menentukan karena tanpa pihak yang aktif memfasilitasi, kolaborasi dapat mudah jalan di tempat atau berantakan akibat perbedaan kepentingan yang tidak dikelola dengan baik. Dari seluruh informan yang diwawancarai, BPBD merupakan pihak yang paling menonjol perannya dalam memfasilitasi kolaborasi. Bukan hanya sebagai pelaksana teknis di lapangan, BPBD juga mengintegrasikan informasi dari semua pihak, mengelola grup WhatsApp, berkoordinasi dengan BMKG untuk peringatan dini, dan menjalankan program Desa Tangguh Bencana. Posisi BPBD sebagai pemilik peralatan teknis secara tidak langsung memperkuat peran fasilitasinya, karena semua pihak bergantung pada peralatan BPBD sehingga otomatis terus berkoordinasi dengan lembaga ini.

Di level wilayah, Camat memainkan peran yang tidak kalah penting sebagai jembatan komunikasi antara desa/kelurahan dengan BPBD dan instansi lain di atasnya. Camat tidak hanya duduk di balik meja, melainkan turun langsung ke lapangan didampingi kelurahan untuk memantau situasi di titik banjir. Hal ini sejalan dengan konsep pemimpin fasilitatif yang aktif hadir dalam proses.Meski kepemimpinan fasilitatif sudah ada, peneliti menemukan bahwa sifatnya masih cenderung dari atas ke bawah. Rapat evaluasi atau forum diskusi baru digelar jika ada perintah dari pihak yang berwenang, bukan karena inisiatif bersama:

Kondisi ini membuat kolaborasi lebih banyak bergerak karena digerakkan, bukan karena kesadaran bersama. Idealnya dalam konsep Ansell dan Gash, pemimpin fasilitatif mendorong semua pihak untuk proaktif dan merasa setara dalam proses, bukan sekadar menunggu perintah. Transformasi dari kepemimpinan top-down menuju model fasilitatif yang lebih horizontal merupakan agenda penting yang masih perlu diwujudkan.

Proses Kolaborasi (Collaborative Process)

Variabel terakhir dan paling kompleks adalah proses kolaborasi itu sendiri. Ansell dan Gash membagi proses ini ke dalam lima elemen yang saling terkait: dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan capaian antara.

Dalam hal dialog tatap muka, di Kecamatan Lahat dialog memang sudah terjadi, namun hanya di dua momen saat pembekalan program Desa Tangguh Bencana dan saat koordinasi di posko bencana ketika kejadian berlangsung. Pihak kepolisian menjelaskan, Dialog yang terjadi selama ini lebih banyak bersifat teknis dan operasional (siapa mengerjakan apa di lapangan), belum menyentuh forum yang membahas evaluasi kebijakan atau penanganan akar masalah struktural banjir seperti pendangkalan Sungai Lematang dan perbaikan sistem drainase.

Kepercayaan antar pihak dalam kolaborasi di Kecamatan Lahat sudah terbangun kuat. Salah satu buktinya adalah kesediaan semua pihak membantu di luar tugas formalnya.

Kepercayaan juga dikuatkan oleh konsistensi BPBD dalam memberikan informasi peringatan dini kepada daerah-daerah rawan bencana sekitar 50 menit sebelum banjir terjadi berdasarkan data BMKG. Dengan rutin menyampaikan informasi ini, BPBD telah membuktikan diri sebagai pihak yang dapat dipercaya. Reputasi ini secara tidak langsung membuat pihak lain semakin percaya pada koordinasi yang dikelola BPBD. Komitmen terhadap proses muncul dari kesadaran bahwa tidak ada pihak yang bisa bekerja sendiri. TNI membutuhkan alat yang dimiliki BPBD; BPBD membutuhkan pengetahuan lokal yang ada di masyarakat; kelurahan membutuhkan tenaga dari TNI dan Polri. Ketergantungan yang saling mengisi inilah yang menjadi perekat komitmen semua pihak untuk tetap terlibat.

Dalam hal pemahaman bersama, semua pihak sudah memiliki gambaran yang jelas tentang pembagian tugas. Koordinasi lapangan menegaskan bahwa tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, TNI pun mengonfirmasi bahwa dalam kolaborasi ini tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan karena semua pihak bergerak ke arah tujuan yang sama. Namun, pemahaman bersama baru sampai di level penanganan darurat, belum menjangkau level pencegahan struktural.

Capaian Konkret Kolaborasi

Di tengah berbagai keterbatasan yang telah diuraikan, kolaborasi multi-stakeholder di Kecamatan Lahat tetap menghasilkan capaian nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Terdapat tiga capaian utama yang dapat diidentifikasi. Pertama, pembangunan dinding penahan banjir di kawasan permukiman sekitar Sungai Lematang yang secara signifikan mengurangi frekuensi dan dampak banjir di wilayah tersebut. Kedua, terbentuknya kelompok Desa Tangguh Bencana di dua kelurahan rawan banjir (Talang Jawa Selatan dan Bandar Jaya) yang meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat di tingkat lokal, termasuk kemampuan evakuasi mandiri sebelum BPBD, TNI, dan Polri tiba. Ketiga, beroperasinya sistem peringatan dini berbasis informasi BMKG yang diperkuat dengan grup

WhatsApp lintas instansi sebagai media koordinasi cepat, memungkinkan respons yang lebih efisien saat banjir akan terjadi.

Capaian-capaian ini menjadi bukti bahwa kolaborasi multi-stakeholder, meskipun belum optimal secara institusional, mampu menghasilkan perubahan nyata dalam pengurangan risiko bencana banjir di Kecamatan Lahat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kolaborasi multi-stakeholder partnership dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dapat ditarik dua kesimpulan utama.

Pertama, kebijakan penanggulangan banjir di Kecamatan Lahat telah tersusun secara sistematis dalam tiga tahap (prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana), berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diperkuat oleh Peraturan Bupati Lahat Nomor 17 Tahun 2022. Kerangka kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah Kabupaten Lahat dalam menanggulangi dan memitigasi risiko bencana banjir secara terstruktur, dengan BPBD sebagai lembaga koordinator utama yang didukung oleh TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

Kedua, kolaborasi multi-stakeholder partnership dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Lahat telah memenuhi sebagian besar unsur collaborative governance sebagaimana dikonsepkan oleh Ansell dan Gash (2008). Kondisi awal yang kondusif ditandai oleh kapasitas aktor yang saling melengkapi dan riwayat kerjasama yang panjang tanpa konflik berarti. Kepercayaan antar pihak telah terbangun kuat, dibuktikan oleh kesediaan semua instansi membantu di luar tugas formalnya. Capaian konkret berupa pembangunan dinding penahan banjir, terbentuknya Desa Tangguh Bencana, dan beroperasinya sistem peringatan dini menjadi bukti nyata keberhasilan kolaborasi ini.

Namun, kolaborasi ini masih belum optimal apabila dibandingkan dengan model ideal Ansell dan Gash yang mensyaratkan proses yang lebih horizontal dan inklusif. Hierarki birokrasi masih sangat terasa, belum adanya MOU formal yang mengatur mekanisme kolaborasi secara tertulis, serta komunikasi yang masih terbatas pada koordinasi teknis operasional dan belum menyentuh penanganan akar masalah struktural banjir menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penguatan sistem kelembagaan melalui formalisasi mekanisme koordinasi, perluasan ruang dialog, serta transformasi pendekatan dari top-down menuju partisipasi yang lebih bottom-up merupakan agenda penting yang perlu diwujudkan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi penanggulangan banjir di Kecamatan Lahat.

REFERENCES

Agustining, L. A. (2013). Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Pasuruan (Studi di Kecamatan Rejoso KabupatenPasuruan).UniversitasBrawijaya. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/100193/

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Ariyaningsih, A., Erik, B., & Sukmara, B. (2021). Kriteria ketahanan kota berdasarkan jenis bencana prioritas di Kota Balikpapan. Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, 16(1), 74. https://doi.org/10.20961/region.v16i1.44149

Badan Pusat Statistika. (2025). Kecamatan Lahat Dalam Angka 2025. https://lahatkab.bps.go.id

Creswell, J. W. (2017). Research Approaches and Designs. Research and Biostatistics for Nurses, 168–169. https://doi.org/10.5005/jp/books/13016_6

Dana, O. R. (2022). Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana Dalam Perspektif. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, 4, 101–110.
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif.
Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54.
Hemmati, M., Dodds, F., Enayati, J., & McHarry, J. (2002). Multi-stakeholder processes for governance and sustainability: Beyond deadlock and conflict. Earthscan. https://doi.org/10.4324/9781849772037
Hendryadi. (2021). Komentar editor: Posisi teori dalam artikel serambi penelitian. Journal Imperium Institute, 3(2), 2–4.
Hidayatullah, M. A., Purnaweni, H., & Yuwono, T. (2023). Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang. 8(4), 276–285.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE.
Putri Agusna. (2023). Kolaborasi Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Masyarakat dalam Menanggulangi Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang.
Riska, et al. (2023). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
Rohmawati. (2025). Data banjir di Kecamatan Lahat. Dokumen BPBD Kabupaten Lahat.
Tanzil. (2024). Studi Penanggulangan Bencana Secara Kolaboratif yang Berbasis Komunitas di Kota Kendari. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan.
Umabaihi, H. I. (2022). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Kepulauan Sula. Jurnal Administrasi Publik.